



**Judul** : Revisi UU MD3, penambahan kursi pimpinan DPR segera dibahas  
**Tanggal** : Selasa, 14 Maret 2017  
**Surat Kabar** : Kompas  
**Halaman** : 2

## REVISI UU MD3

# Penambahan Kursi Pimpinan DPR Segera Dibahas

JAKARTA, KOMPAS — Dengan turunnya surat presiden terkait revisi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, pembahasan tentang penambahan satu kursi pimpinan legislatif untuk Fraksi PDI Perjuangan akan segera dibahas. Substansi revisi diharapkan tidak menjadi bola liar yang berdampak pada keseluruhan komposisi unsur pimpinan DPR/MPR.

Revisi Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) diusulkan Fraksi PDI-P yang merupakan partai pengusung pemerintah sejak akhir 2016. Pada 24 Januari 2017, revisi UU MD3 telah disahkan menjadi RUU inisiatif DPR. Da-

lam draf yang diusulkan, sebagai partai dengan perolehan suara tertinggi pada Pemilu 2014, PDI-P mengusulkan penambahan satu wakil ketua di DPR dan MPR untuk kadernya.

Kemarin, surat presiden (surpres) terkait revisi UU MD3 sudah tiba di meja pimpinan DPR. Surpres berisi penugasan Presiden Joko Widodo terhadap sejumlah menteri untuk membahasnya dengan DPR.

"Surpres sudah turun dan saat ini dalam proses di DPR," kata Kepala Biro Kepemimpinan Sekretariat Jenderal DPR Hany Tahapary saat dihubungi di Jakarta, Senin (13/3).

Sesuai dengan mekanisme pembahasan undang-undang

yang berlaku, sebelum disahkan menjadi UU, masih ada dua tahap yang harus dilalui. Pertama, pembahasan materi revisi UU MD3 oleh DPR dan pemerintah. Kedua, rapat paripurna DPR untuk pengambilan keputusan. Terakhir, mengesahkan RUU tersebut menjadi UU MD3.

Wakil Sekretaris Fraksi Partai Golkar Sarmudji mengatakan, Golkar tetap berkomitmen membahas revisi UU MD3. Namun, substansi revisi UU MD3 diharapkan tidak berubah lagi dan cukup untuk menambah kursi wakil ketua DPR dan MPR perwakilan dari Fraksi PDI-P. "Konsisten saja dengan semangat awal, cukup menambah satu wakil ketua, urusan selesai. Jangan

keluar dari konteks itu dan jangan ada multitafsir terhadap pasal tersebut,” katanya.

### **Konsisten**

Ketua Gugus Tugas Revisi UU MD3 dari Fraksi PDI-P Junimart Girsang meminta fraksi-fraksi di DPR tetap konsisten dengan komitmen merevisi UU MD3 demi menambah kursi pimpinan DPR. “Saya hanya minta agar jangan ada yang berbohong. Jika memang surpres sudah masuk, katakan sudah agar pembahasan revisi dapat segera dimulai, jangan digantung,” kata Junimart.

Ia mengatakan, fraksi-fraksi lain di DPR tidak perlu khawatir. Sebab, PDI-P tetap konsisten dengan substansi awal revisi yang

sudah disepakati semua fraksi di DPR. “Kami tetap sesuai kesepakatan awal, tidak perlu takut akan ada perubahan komposisi pimpinan. Sejauh ini, tidak ada perubahan draf,” kata Junimart.

Pemerintah memang menyetujui pembahasan revisi UU MD3. Kepastian penerbitan surpres disampaikan Sekretaris Kabinet Pramono Anung Wibowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

“Sudah, sudah (dikirim ke DPR),” katanya saat ditanya apakah Presiden Joko Widodo sudah membuat surpres ke DPR. Namun, Pramono tidak bersedia menjelaskan kapan surpres dikirim ke DPR. (AGE/NTA)